

IDN/ANTARA



SIDANG PERDANA EDHY PRABOWO

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo usai menjalani sidang perdana kasus dugaan suap izin ekspor benih bening lobster atau benur yang digelar secara virtual dari Pengadilan Tipikor di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/4). Sidang tersebut beragenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.

KPK Mendalami Proses Pengajuan Banprov pada Kabupaten Indramayu

JAKARTA (IM) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses pengajuan Bantuan Provinsi (Banprov) pada Kabupaten Indramayu. Penyidik KPK menggali informasi saat memeriksa tiga orang anggota DPRD Jawa Barat.

Ketiga anggota dewan itu adalah Cucu Sugyati, Al Maida Rosa Putra dan M. Hasbullah Rahmad. Ketiganya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun 2019.

Para saksi tersebut mengalami pengetahuannya antara lain terkait dengan tahapan dan proses pengajuan serta usulan proposal program kegiatan proyek untuk Bantuan Provinsi pada Kabupaten Indramayu,” ujar Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (15/4).

Selain itu, ketiganya juga ditilik mengenai aliran dana ke beberapa pihak terkait Bantuan Provinsi pada Kabupaten Indramayu itu. “Dugaan aliran sejumlah dana kepada pihak-pihak tertentu atas disetujuinya usulan Bantuan Provinsi tersebut,” jelasnya. Sebagai informasi, pada

Selas (13/4) lalu, penyidik KPK telah memeriksa tiga saksi yakni, Akhmad Deni Sumirat (Staff Sekretariat Dewan Provinsi Jawa Barat), R. Bela Bakti Negara (Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan BAPPEDA Provinsi Jawa Barat), dan Ferry Mulyadi (PNS/Staf Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu).

Dari ketika saksi ini penyidik KPK juga mengali informasi soal tahapan dan proses pengajuan serta usulan proposal program kegiatan proyek untuk Bantuan Provinsi pada Kabupaten Indramayu.”

Diketahui, KPK telah menetapkan tersangka baru atas kasus dugaan suap terkait bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2017 sampai 2019. Hal itu sejalan dengan adanya penyidikan baru dalam kasus ini.

“Saat ini KPK sedang melakukan kegiatan pengembangan penyidikan dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017-2019,” kata Ali. han

SOAL VAKSIN NUSANTARA

Terabas Aturan BPOM, Anggota DPR Beri Contoh Tak Baik ke Masyarakat

Meski belum ada izin dari BPOM, salah satu pimpinan dan beberapa anggota DPR mengikuti kegiatan pengambilan sampel darah untuk Vaksin Nusantara.

JAKARTA (IM) - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, ada cara berpikir dan bertindak yang salah dari seorang pimpinan dan sejumlah anggota DPR yang pada Rabu (14/4) menjadi relawan Pelaksanaan Uji Klinis (PUK) untuk uji klinis fase II untuk Vaksin Nusantara.

Ujang melihat pimpinan dan anggota DPR itu telah menerabas ketentuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang belum

mengetahui izin uji klinis fase II untuk Vaksin Nusantara. “Menjadi relawan vaksin Nusantara sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Namun, ketika izin uji klinisnya belum ada kan ini yang jadi persoalan. Mestinya urus dulu uji klinisnya agar vaksinnya sesuai ketentuan. Baru jadi relawan vaksin,” kata Ujang, Kamis (15/4).

Anggota DPR dinilai bertindak tidak hati-hati dan memberikan contoh yang kurang baik kepada rakyat. Tindakan sejumlah anggota DPR dengan

menerabas ketentuan BPOM isangat berbahaya.

DPR telah memberikan contoh yang kurang baik kepada rakyat. Karena rakyat seolah-olah diajari untuk menerabas aturan. Dan ini sangat berbahaya,” ujarnya.

Ujang mengingatkan para anggota dewan yang terhormat supaya memberi contoh kepada masyarakat, terutama soal vaksin Covid-19. Ia meminta, para wakil rakyat itu bertindak hati-hati dan mengikuti aturan yang diputuskan BPOM dengan menunggu Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinis (PPUK) untuk uji klinis tahap dua dan tiga.

Diberitakan sebelumnya, salah satu pimpinan DPR dan beberapa anggota DPR mengikuti kegiatan pengambilan sampel darah untuk Vaksin Nusantara. Mereka bertindak

dan menyebut dirinya sebagai relawan Vaksin Nusantara.

KSAD Diminta Turun Tangan

Sementara itu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane, meminta Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Andika Perkasa, turun tangan agar polemik soal Vaksin Nusantara yang proses pembuatannya di RSPAD Jakarta tidak berkepanjangan yang bisa merusak masyarakat. “IPW menilai sikap tegas KSAD diperlukan agar tidak muncul keresahan dan kegaduhan di masyarakat atas polemik Vaksin Nusantara,” ujar Neta S Pane dalam keterangannya, Kamis (15/4).

Menurut Neta, dengan adanya sikap tegas KSAD nasib Vaksin Nusantara makin jelas dan publik tidak ragu-ragu lagi, meski ada pihak-pihak yang meragukannya. “Sikap tegas KSAD ini diperlukan setelah adanya surat Kepala RSPAD Dr. A. Budi Sulisty yang ditujukan ke KSAD dengan ditubuhkan Wakasad, Irenad, Asintel Kasad, Kapuskesad, Waka RSPAD, dan Kadispasad,” kata Neta.

Vaksin Nusantara menjadi viral setelah sejumlah tokoh dan anggota DPR datang ke RSPAD untuk diberi vaksin temuan Terawan tersebut. Melihat fenomena ini sejumlah kalangan, termasuk BPOM

mengkritiknya. Tak pelak kegaduhan pun muncul. “Agar kegaduhan tidak berkembang menjadi keresahan masyarakat, DPR perlu bersikap, mengingat sejumlah anggotanya ikut hadir di RSPAD untuk mendapatkan Vaksin Nusantara. DPR mesti terbuka kepada rakyat, apa sesungguhnya yang terjadi dengan para anggotanya setelah hadir di RSPAD,” ulasnya.

Sikap terbuka itu kata Neta perlu juga disampaikan KSAD kepada masyarakat. “KSAD perlu mengklarifikasi dan menjawab pertanyaan publik yang datang ke KSAD dan adanya surat dari Kepala RSPAD.

“Info yang diperoleh IPW, Surat Kepala RSPAD yang ditujukan ke KSAD itu berisi empat poin,” ujarnya.

Berikut 4 poin tersebut: 1. Sehubungan dengan info info di medsos berkaitan dengan pemberian Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto perlu kami laporkan bbrp hal sbb:

a. Penelitian Fase ke-2 tengah dalam proses penyiapan. Ethical clearance sedang dlmp proses pembahasan di Komite Ethic RSPAD Gatot Soebroto.

b. Mempedomani juk Bapak KSAD, Sebagai Kepala RSPAD Gatot Soebroto kami sdh menekankan kepada Tim Peneliti untuk mengikuti tahapan penelitian serta strict pada kriteria inklusi & eksklusi penelitian demi validitas penelitian. han

PKS Dorong Pemerintah Jadikan RUU Perampasan Aset sebagai Prioritas

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Achmad Dimiyati Natakusumah mengatakan, fraksinya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana. Sebab itu, PKS mendorong agar pemerintah mengusulkan RUU tersebut masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

“Saya berharap memang RUU ini segera menjadi prioritas, tetapi itu tergantung pemerintah yang mewakili Menkumham, kan di situ Menkumham sebagai leading sector-nya untuk pembahasan prolegnas dan prolegnas prioritas,” kata Dimiyati, Kamis (15/4).

Menurut Dimiyati, pemerintah sudah semestinya mendorong RUU tersebut ke DPR karena pembahasan di tingkat pemerintah sudah lama selesai. Selain itu, ia juga menilai RUU tersebut urgen untuk segera disahkan agar ada payung hukum untuk mengambil alih seluruh hasil tindak pidana.

“Negara ini kan kerugian keuangan negara sangat besar, utang juga sangat besar, ini yang sebetulnya bisa dilakukan oleh pemerintah,” katanya.

Apabila RUU Perampasan Aset tak kunjung disahkan, Dimiyati khawatir pelaku kejahatan dapat terus menyembunyi dan menyamarkan

hasil kejahatannya. “Ini kan banyak kasus-kasus yang seperti itu, apalagi uangnya dibawa kabur ke luar negeri, dia maling di sini, rampok di sini, uangnya dibawa keluar,” kata Dimiyati.

Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae menyinggung janji Presiden Joko Widodo dalam Nawacita lantaran RUU Perampasan Aset tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021. “Dapat kami sampaikan kembali. Kedua RUU ini telah menjadi janji Bapak Presiden pada Nawacita 2014-2019 dan kemudian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024,” ujar Dian rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III, Rabu (24/3).

Desakan terkait pengesahan RUU Perampasan Aset pernah dilontarkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). RUU tersebut dibutuhkan untuk merampas aset hasil kejahatan korupsi tanpa bergantung pada kehadiran para pelaku.

“RUU ini kami yakini menjadi paket penting untuk dapat merampas aset hasil kejahatan korupsi. Di masa yang akan datang, jika RUU ini sudah disahkan, penegak hukum tidak lagi bergantung dengan kehadiran para pelaku korupsi di Indonesia,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana Kurnia, Rabu 15 Juli 2020. han

Prada Ilham Dituntut 1,5 Tahun Penjara Terkait Penyerangan Mapolsek Ciracas

JAKARTA (IM) - Prada Muhammad Ilham (MI) dituntut 1,5 tahun penjara dan dipecah dari TNI terkait kasus penyerangan Markas Polsek (Mapolsek) Ciracas. Tuntutan itu dibacakan oditur militer di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Kamis (15/4).

“Kami mohon agar majelis hakim menjatuhkan terdakwa dengan hukuman sebagai berikut a. Pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara,” kata oditur militer dalam rekaman yang diterima wartawan, Kamis (15/4).

Kemudian pada butir ‘b’, oditur militer menuntut Prada Ilham dipecah dari TNI Angkatan Darat. “Pidana tambahan

dipecah dari dinas militer cq TNI Angkatan Darat,” ujar oditur militer. “Mohon agar terdakwa ditahan,” lanjut oditur militer dalam tuntutannya.

Hal ini sebagaimana diatur dan diancam tindak pidana dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengatakan, Prada Ilham diduga menyebarkan berita bohong atau hoaks tentang kecelakaan yang menimpaannya melalui pesan elektronik. Prada Ilham diketahui berbohong terkait penyebab kecelakaan ketika pernyataannya dicocokkan dengan keterangan sembilan saksi dari warga sipil.

Kabar bohong itu menjadi pemicu penyerangan Polsek Ci-

racas, pertokoan, hingga warga sipil oleh massa.

Menurut Dudung, kronologi yang sebenarnya terjadi adalah MI mengalami kecelakaan motor saat mengendarai sepeda motor di sekitar Jalan Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, tepatnya di dekat pertigaan lampu merah Arundina.

“Sebetulnya yang bersangkutan itu menyampaikan kepada pimpinannya, ditanya oleh pimpinannya, kamu sebetulnya seperti apa? (Ilham menjawab) saya kecelakaan tunggal,” kata Dudung, beberapa waktu lalu.

“Tetapi yang bersangkutan justru memberikan informasi kepada kawan-kawannya di grup maupun ada senior-nya bahwa dia dikeroyok, nah itu yang tidak benar,” lanjutnya. o sm

PT SANGIHE PRIMA MINERAL ("Perseroan")
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan rencana pengambilalihan saham-saham dalam Perseroan yang akan dilakukan oleh suatu pribadi hukum warga negara Indonesia.

Table with 4 main sections: 1. PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN KEUANGAN (Financial Statements for Dec 31, 2020 and 2019). 2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (Income Statement for Dec 31, 2020 and 2019). 3. LAPORAN ARUS KAS KOMSOLIDASIAN (Cash Flow Statement for Dec 31, 2020 and 2019). 4. Catatan (Notes and additional information).